

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Studi mengenai uraian hubungan dan interaksi antar negara, termasuk kegiatan dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional, dikenal sebagai hubungan internasional. Hubungan internasional merupakan fenomena yang dapat bertajuk teoretis dan praktis, serta subjek kebijakan, dan pandangan akademis terhadapnya bisa bersifat empiris, normatif, ataupun keduanya<sup>1</sup>.

Deskripsi hubungan internasional adalah koneksi yang melintasi garis nasional dan mencakup bidang multifaset dan multidisiplin. Saat ini, evolusi hubungan internasional telah mengalami banyak perubahan, terutama semenjak pada masa perang dingin yang mengubah dan memunculkan bentuk-bentuk baru dari fenomena hubungan internasional.

Hubungan internasional yang terjalin diantara negara Indonesia dan negara Tiongkok merupakan suatu bentuk interaksi antar negara yang sangat penting bagi negara Indonesia maupun negara Cina itu sendiri. Secara historis sebenarnya Indonesia telah menjalin hubungan dengan Cina yang dapat ditelusuri hingga abad pertama masehi. Hal ini terbukti dengan adanya kontak

---

<sup>1</sup> Robert Jakson and Georg Sorensen (2013). *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan Edisi Kelima*. Pustaka Pelajar

antara penduduk didaratan Cina dan di kepulauan nusantara, serta ketika negara Cina masih berada di masa dinasti Tang, Ming dan Qing<sup>2</sup>.

Interaksi kedua negara tersebut secara resmi dimulai pada tahun 1950 yang sangat dipengaruhi oleh faktor domestik kedua negara. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun hubungan Indonesia-Cina berlangsung dalam sebuah alur yang dinamis. Dinamika ini membuktikan bahwa ada gelombang pasang maupun gelombang surutnya. Dalam hubungan Indonesia-Cina mengalami kemajuan yang pesat terutama pada kemitraan strategis yang dimulai pada tahun 2005.

Indonesia dan Cina mencapai kebebasannya setelah perang dunia II, namun pada tahun 1953 kerjasama ekonomi diantara kedua negara mulai terbentuk. Hubungan ekonomi bilateral diantara kedua negara berkembang dengan baik pada masa itu hingga terjadi fenomena perpolitikan 30 SPKI tahun 1965. Semenjak peristiwa tersebut, fenomena perpolitikan dan perekonomian negara Indonesia dan pemerintahan Cina tidak lagi berjalan secara harmonis meskipun secara ekonomi kedua negara saling membutuhkan<sup>3</sup>.

Perubahan hubungan ekonomi bilateral antara Indonesia dan Cina yang telah lama terjalin telah mengalami perubahan semenjak peristiwa G-30 SPKI. Akibatnya hubungan diplomatik Indonesia-Cina lebih mengarah pada saling

---

<sup>2</sup> Kong Yuanzhi, *Silang Budaya China Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 1999.

<sup>3</sup> Lidya Christhin Sinaga, *Hubungan Indonesia-Cina dalam Dinamika Politik, Pertahanan-Keamanan, dan Ekonomi di Asia Tenggara*, Jakarta: LIPI Press, 2013. Hlm. 62

curiga. Perbedaan kepentingan nasional maupun sistem politik dan perekonomian negara Indonesia dan negara Cina tidak selamanya berada dalam keadaan yang saling berimbang. Alhasil ketika pemerintahan Cina mengalami kemajuan pada perekonomiannya, keberadaan negara Indonesia terkesan kurang mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk meraih keuntungan dari interaksi perekonomian yang telah terjalin dengan Cina.

Indonesia banyak menerima investasi dari Cina dan membentuk berbagai kerjasama sektor perniagaan dan investasi bilateral. Penetapan perbatasan maritim natuna utara dan pengaruhnya pada hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Cina tidak serta merta memberikan pengaruh yang besar pada sektor perekonomian dan penanaman modal, serta industri terkait lainnya yang selama ini terjalin dengan harmonis ikatannya bisa runtuh seketika. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara saling ketergantungan dimana negara Indonesia membutuhkan penanaman modal dari Cina untuk membantu perbaikan pembangunan infrastruktur.

Masa kepemimpinan Joko Widodo hubungan antara Indonesia dan Cina kian dinamis dan harmonis. Pada periode kepresidenannya, negara Indonesia mulai berpacu dalam memperpendek ketertinggalan pada bidang infrastruktur hingga dibutuhkan anggaran biaya yang tinggi dalam mewujudkannya.

Hal ini yang turut menjadi salah satu alasan presiden Joko Widodo memprioritaskan perbaikan konstruksi infrastruktur sebagai sarana pertumbuhan perekonomian. Beberapa negara di belahan dunia bahkan lebih

memilih mengembangkan pembangunan nasional negara guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian domestiknya hal serupa turut diupayakan oleh negara Indonesia.

Perbaikan bidang infrastruktur merupakan salah satu bentuk pembangunan di suatu negara. Hal ini karena ketersediaan infrastruktur yang mutakhir sangat penting untuk memajukan pertumbuhan suatu negara. Hasilnya, pemerintah Indonesia terlibat dan menandatangani strategi "*One Belt, One Road*" Cina, yang kemudian diperbarui menjadi "*Belt Road Initiative*".

Pada tahun 2016 Indonesia memutuskan untuk berkolaborasi atas konstruksi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Akibat keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam kerjasama ekonomi proyek *Belt and Road Initiative*, banyak perspektif yang beragam muncul. *Belt and Road Inisiatif* adalah program yang diumumkan oleh pemerintah Cina pada tahun 2016 dengan tujuan memulihkan dan melampaui kejayaan sebelumnya sebagai hegemoni yang mengendalikan perniagaan dunia melalui jalur lintasan yang disebut *Silk Road*.<sup>4</sup>

Pemerintah Cina turut membangun jaringan pipa minyak dan gas serta jalur kereta berkecepatan tinggi lintas negara. Pada 2015, negara Cina bahkan meluncurkan bank investasi infrastruktur Asia yang merupakan organisasi

---

<sup>4</sup> Anam, Syaiful dan Ristiyani. (2018). *Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping*. Jurnal ilmiah Hubungan internasional. Vol 14 No 2 2018.

keuangan internasional guna membantu sejumlah negara dengan pembiayaan infrastruktur, khususnya yang berada di lokasi vital yang dilintasi jalur sutra<sup>5</sup>.

Anggaran pembiayaan dapat disumbangkan secara terbuka atau sebagai penanaman modal. Menurut Tiongkok, *Belt and Road Initiative* dibangun atas gagasan kerjasama damai yang saling menguntungkan. Negara Indonesia termasuk salah satu negara yang aktif berpartisipasi dalam inisiatif *Belt and Road*, bahkan diperkirakan pada saat itu terdapat 68 negara yang tergabung dalam *Asian Infrastructure Investment Bank*.<sup>6</sup>

Mitra non-regional dari inisiatif kerjasama ini turut melibatkan negara-negara besar yakni Jerman, Inggris dan Prancis. Kebijakan pemerintah Cina tersebut saling berkesinambungan dengan visi poros maritim dunia presiden Joko Widodo di tahun 2014, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi besar kekuatan nyata sektor kelautan dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara *middle power* dalam perekonomian dan perpolitikan di Asia Pasifik<sup>7</sup>.

Pemerintah Indonesia turut serta menawarkan beberapa proyek yang butuh penanaman modal untuk pembangunan jalan tol dan kereta ke negara Cina. Salah satu bentuk realisasi dari inisiatif *Belt and Road* antara Indonesia dan Cina yakni di tahun 2016, pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian diwujudkan pada 2018.

---

<sup>5</sup> Nanto Sriyanto. *Global Maritime Fulcrum Indonesia-China Growing Relations and Indonesia Middlepowermentship in East Asia Region*. Jurnal Kajian Wilayah Vol. 9 No. 1, 2018.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Yagci Mustafa. (2018). *Rethinking in Light of China's Belt and Road Initiative*. Uluslararası İlişkiler Vol. 15 No 57, 2018

Meskipun dengan adanya dampak positif tersebut sejumlah kontroversi turut muncul terkait keputusan yang diambil pemerintahan Indonesia. Salah satu kritiknya berupa tidak konsistennya prinsip kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia yang semestinya bersifat bebas aktif menjadi terkesan berpihak ke Cina.

kemitraan ini dipandang sebagai tindakan kebimbangan pemerintah Indonesia dalam menanggapi tindakan pemerintah Cina yang sebelumnya berusaha mengklaim kawasan natuna secara sepihak sebagai bagian dari "sembilan wilayah garis putus-putus" Cina, sehingga tindakan ini melanggar kedaulatan Indonesia berdasarkan hukum laut internasional<sup>8</sup>.

Menurut beberapa ekonom politik, ketidaktepatan pemerintah Indonesia dalam menilai niat pemerintah Cina tersebut disebabkan oleh strategi yang diterapkan yang mungkin merupakan bentuk diplomasi jebakan utang pemerintah Cina untuk menciptakan ketergantungan pada negara-negara aliansi kooperatif, seperti apa yang menimpa Sri Lanka, Bangladesh, Laos dan Pakistan, yang terpaksa menyerahkan kawasan teritorinya dikuasai negara Cina. Skenario serupa diperkirakan akan terulang di Indonesia.

Pertentangan lain adalah bahwa ada beberapa bentuk kerjasama alternatif, termasuk kemitraan Trans-Pasifik, yang didirikan oleh Amerika, bank pembangunan Asia, yang didirikan oleh Jepang, dan ASEAN, yang merupakan rezim regional Indonesia dan dianggap sebagai kekuatan gabungan negara-negara Asia Tenggara. Sejak 2010, ASEAN telah mengembangkan

---

<sup>8</sup> Nanto Sriyanto, Op.Cit., Vol.9, No 1

rencana induk untuk kebijakan konektivitas ASEAN, yang memiliki ambisi yang sama dengan poros maritim internasional Indonesia, inisiatif sabuk dan jalan Cina, dan kemitraan trans Pasifik Amerika yakni untuk memperluas koneksi transportasi antara negara aliansi atau mitra negara<sup>9</sup>.

Di delapan ranah, Indonesia dan Cina telah menandatangani perjanjian kerjasama. Kunjungan kenegaraan tahun 2015 tersebut direncanakan sebagai kunjungan kenegaraan yang signifikan mengingat negara Cina merupakan negara yang memiliki potensi besar untuk kerjasama yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia maupun negara-negara Asia lainnya. Istilah *joint venture* mengacu pada proses pengembangan produk atau layanan baru<sup>10</sup>.

Negara Cina membutuhkan Indonesia untuk dapat mengembangkan rute sutra maritim Beijing, yang merupakan bagian dari inisiatif *One Belt One Road*. Untuk memenuhi ambisi ini, pemerintah Cina membutuhkan jalinan kerjasama yang erat dengan Indonesia, yang memiliki kekuatan besar di ASEAN.

Meskipun begitu hubungan kerjasama kedua negara tidak berjalan harmonis, adanya ketegangan kemaritiman atas natuna utara menyebabkan interaksi antar bangsa mengalami naik-turun. Kendati demikian tingginya minat negara Indonesia dan negara Cina guna membentuk ikatan kemitraan internasional sebagai sarana meningkatkan perekonomian masing-masing

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> INDOFORWARDING. (2017, Oct 14). *Hubungan Indonesia Dan China*. Retrieved from <https://indoforwarding.com/hubungan-indonesia-dan-china/>. Diakses pada 5 september 2022

negara setidaknya menurunkan ego kedua negara untuk tidak terlalu jauh bertindak dalam menyikapi persengketaan kedaulatan wilayah laut natuna utara.

Indonesia dan Cina telah menjalin hubungan kerjasama ekonomi melalui ekspor dan impor. Tahun 2010 Indonesia menjadi rekan kerjasama perniagaan terbesar keempat Cina sebagai hasil dari kemitraan ekonomi jangka panjang mereka. Demikian pula, ekspor batu bara, minyak sawit, gas, dan minyak bumi Indonesia meningkat setidaknya 58%. Karena negara Cina merupakan importir komoditas terbesar, pasar Cina sangat signifikan bagi bisnis ekspor Indonesia, alhasil komoditi ekspor negara Indonesia dinilai lebih tinggi US\$100 juta.

Pemerintah Cina meningkatkan upayanya untuk menjamin negara Indonesia menjadi mitra kerjasama utama bagi negara Cina. Kedua negara berupaya menjaga kemitraan kerjasama yang saling menguntungkan hingga kedepannya negara Indonesia mampu memenuhi tuntutan Cina dan begitu pula sebaliknya<sup>11</sup>.

Alhasil, untuk menuntaskan mega proyek *silk road*, pemerintah Cina berusaha mengakhiri bentuk-bentuk konfrontasi dengan pemerintah Indonesia. Hal ini akhirnya diadopsi oleh pemerintah Cina dalam perselisihan teritori laut

---

<sup>11</sup> Juniar Laraswanda Umagapi, "The Rise of China-Indonesia Relationship: Soft Power, Resources, and Prospect in the Future," *Indonesian Perspective*, vol. 2, no. 2, pp. 131-142, Dec. 2017.



natuna. Pada konferensi tingkat tinggi kedua tentang inisiatif jalur sutra pada 2019, sejumlah pemimpin bisnis menandatangani 23 pernyataan kerjasama<sup>12</sup>.

Menurut Djauhari Oratmangun selaku duta besar republik Indonesia untuk Cina, hubungan komersial Indonesia dengan Cina meningkatkan jumlah *inbound budget* sebesar 81,3% pada 2019. Ditahun yang sama pula jumlah proyek yang didanai negara Cina yang dicapai di Indonesia mencapai 1.888 unit, dengan total nilai US\$33,31 miliar. Sebelumnya, pada 2018, hanya ada 1.059 proyek dengan total US\$1,83 miliar.

Keterkaitan dari ketegangan kedaulatan atas laut natuna utara terhadap hubungan kerjasama perekonomian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok dapat ditelaah menggunakan teori penyelesaian konflik oleh Ralf Dahrendorf dan beberapa konsep kerjasama internasional, konsep kepentingan oleh Morgenthau serta konsep geopolitik.

Kenyataan bahwasanya masing-masing negara memiliki visi yang ingin didapatkan dalam meningkatkan taraf perekonomian negaranya, mendorong negara Indonesia maupun negara Cina untuk bersama-sama berusaha untuk tidak menciptakan suatu perselisihan yang dapat memberikan pengaruh terhadap proses pendanaan pembangunan infrastruktur dan perniagaan menjadi terkendala.

Karena sulitnya pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, terutama yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di

---

<sup>12</sup> Tri Inov Haripa, “Mega Proyek Tiongkok : Jalur Sutra Abad 21 dan Konektivitas ASEAN”, <https://pssat.ugm.ac.id/id/mega-proyek-tiongkok-jalur-sutra-abad-21-dan-konektivitas-asean/>. Diakses pada 10 september 2022

daratan, lautan dan udara, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan perbatasan yang panjang dan terbuka dari mana-mana berpotensi rentan menimbulkan konflik kawasan antar negara.

Istilah “*crowdsourcing*” mengacu pada proses pengumpulan informasi dari banyak sumber untuk memberikan gambaran situasi yang lebih komprehensif. Konflik muncul akibat penggunaan berbagai kriteria untuk identifikasi batas landas kontinen antar negara yang berdekatan, sehingga terjadi “tumpang tindih” wilayah yang berujung pada persoalan kedaulatan teritorial<sup>13</sup>.

Negara Indonesia menjadi persinggahan jalur sutra maritim yang menghubungkan Cina dengan India dan dunia Arab. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan mineral, baik di darat maupun di laut. Kekayaan alam di Indonesia memiliki nilai tersendiri dan diminati oleh negara-negara industri maju saat ini, seperti negara Cina yang ingin menguasainya secara langsung maupun tidak langsung. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 243 juta jiwa merupakan pasar yang prospektif bagi produk-produk dari negara maju<sup>14</sup>.

Posisi geografis inilah yang menyebabkan negara Indonesia menjadi negara dengan tingkat ketegangan perbatasan kawasan kelautan yang tinggi. Hal ini dapat terlihat pada kawasan laut natuna yang berada disekitaran persengketaan laut Cina selatan. Adanya persengketaan di kawasan tersebut

---

<sup>13</sup> INDOFORWARDING (2017), Op.Cit., Diakses pada 5 September 2022

<sup>14</sup><https://www.trade.gov/knowledge-product/indonesia-market-opportunities>. diakses pada 19 Juni 2021

justru memunculkan masalah kedaulatan teritori atas laut natuna yang mengakibatkan negara Indonesia mendekat ke Australia hingga kemudian menjalin kerjasama keamanan guna mempertahankan kedaulatan dan kesatuan wilayahnya<sup>15</sup>.

Penyempurnaan yang dilakukan kementerian koordinasi maritim republik Indonesia berupa perubahan penamaan pada sebagian kawasan laut natuna kemudian jadi dinamakan laut natuna utara yang berlokasi di wilayah zona ekonomi eksklusif 200 mil dari laut Indonesia. Kementerian koordinasi kelautan, Luhut Binsar Pandjaitan telah menyatakan bahwasanya perubahan penamaan teritori hanya akan terjadi dalam kawasan kedaulatan negara Indonesia dan tidak akan mencampuri kedaulatan teritorial negara lain<sup>16</sup>.

Di tahun 2017 pemerintah Cina mengirimkan pernyataan resmi kepada kedutaan besar republik Indonesia di Beijing tepatnya pada tanggal 25 Agustus, yang menotakan penolakkannya terhadap langkah Indonesia mengubah peta negara kesatuan republik Indonesia yang lama dan menyatakan bahwasanya tindakan pemerintah Indonesia mengubah nama yang diterima secara internasional mengakibatkan kondisi yang tidak kondusif

---

<sup>15</sup> I Wibowo dan Syamsul Hadi, *MERANGKUL CINA: Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hlm.39

<sup>16</sup> Sutari, T. "China dan Arti Sebuah Nama Laut di Natuna Utara,"<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170721095355-20-229358/china-dan-arti-sebuah-nama-laut-di-utara-natuna>, 2017. Diakses 5 Maret 2021

atas ketegangan di laut Cina selatan dan juga mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut<sup>17</sup>.

Di bawah pemerintahan Joko Widodo, hubungan erat Indonesia dengan Cina membaik. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kerjasama di bidang ekonomi pada kedua negara, yaitu di bidang penanaman modal untuk pembangunan infrastruktur dan perdagangan. Padahal, hubungan kedua negara tidak bisa dilepaskan dari persoalan kedaulatan kawasan, khususnya posisi mereka dalam sengketa kawasan natuna di laut Tiongkok selatan.

Salah satu negara yang berpotensi merugi akibat dari aksi Cina yang menggambarkan sembilan titik wilayah baru di kawasan natuna adalah negara Indonesia. Bahwasanya posisi perairan kaya akan gas tersebut terkesan memasuki kawasan kedaulatan Cina. Berdasarkan aspek hukum, pengelolaan pulau terluar dibutuhkan perancangan perundang-undangan yang mumpuni dalam sarana mempertahankan dan memberdayakannya<sup>18</sup>.

Ketika presiden Joko Widodo menjabat, ia berusaha mengambil pendekatan yang lebih keras dan lebih ketat dari pemerintahan sebelumnya. Menurut presiden Jokowi, garis sembilan titik yang diklaim pemerintah Cina sebagai batas lautnya tidak memiliki dasar hukum dalam hukum laut

---

<sup>17</sup> Berlianto. "China Tuntut Indonesia Batalkan Penamaan Laut Natuna Utara," <https://international.sindonews.com/read/1236125/40/china-tuntut-indonesia-batalkan-penamaan-laut-natuna-utara-1504375223/>, 2017 diakses 5 Maret 2021

<sup>18</sup> Butje Tampi, "KONFLIK KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA (SUATU KAJIAN YURIDIS)". Vol. 23/No. 10/Jul-Desember/2017 Jurnal Hukum Unsrat.

internasional. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah Cina harus berhati-hati dalam membuat peta batas lautnya dalam isu laut Cina Selatan<sup>19</sup>.

Karena kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di Asia Pasifik, bahkan dunia, banyak negara yang tertarik untuk mengakuisisi wilayah laut Natuna. Kajian resmi terkait dengan salah satu sumber daya gas bumi, blok Natuna D-ALPHA, yang memiliki cadangan gas sekitar 222 triliun kaki kubik.

Cadangan gas bumi ini berpotensi tidak akan habis dalam 30 tahun ke depan jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Namun, Kepulauan Natuna memiliki potensi gas yang dapat diperoleh kembali atau diprediksi sebesar 46 triliun kaki kubik, yang sebanding dengan 8.383 miliar barel minyak. Jika digabungkan dengan minyak bumi, ada sekitar 500 juta barel cadangan energi yang hanya ada di blok tersebut<sup>20</sup>.

Marwan Batubara selaku peneliti energi Indonesia menilai, pemerintah semestinya mewaspadaai pengambilan kawasan maritim natuna menjadi prioritas seawal mungkin, karena Indonesia akan kehilangan cadangan migas yang sangat besar jika tidak dipertahankan, hingga kedepannya Indonesia tidak hanya sekadar merugi pada cadangan migas saja tetapi juga melingkupi kekayaan maritim lainnya<sup>21</sup>.

Jika negara Indonesia kehilangan kawasan laut natuna dampaknya akan sangat terlihat dikarenakan sektor migas merupakan salah satu bidang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

yang paling besar pendapatannya. Ini adalah ancaman yang paling signifikan, menurut ketua *Watch Energy*, Ferdinand Hutahean. Dilihat dari letak geografisnya, kawasan laut Cina selatan memiliki keterkaitan perekonomian, perpolitikan, dan strategis karena menghubungkan samudera hindia dan samudera pasifik sebagai jalur pelayaran niaga dan jalur laut komunikasi internasional<sup>22</sup>.

Alhasil interaksi internasional antara negara Indonesia dan Cina mengalami ketegangan di perairan natuna. Permasalahan ini berawal dari klaim Cina di laut Cina selatan yang berbatasan dengan perairan natuna sehingga kapal nelayan asal Cina beberapa kali memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Akan tetapi di lain sisi, besarnya jumlah investasi yang dibutuhkan dalam pengembangan pembangunan infrastruktur, mendorong negara Indonesia untuk melakukan kerjasama ekonomi intensif dengan Cina.

Berdasarkan uraian tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Cina sektor infrastruktur daratan dan lautan melalui kerjasama *belt and road initiative* pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo dengan adanya konflik kedaulatan perbatasan maritim natuna utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

Letak dan kondisi geografis kawasan laut natuna di Indonesia merupakan penyebab Indonesia menjadi negara yang berpotensi tinggi mengalami konflik perbatasan kelautan serta posisi kawasan yang cukup dekat dengan persengketaan atas laut Cina selatan turut meningkatkan potensi

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

konflik diantara negara Indonesia dan Cina. Letak geografis inilah yang menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan negara Cina. persengketaan tersebut semakin meningkat setelah presiden republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari Cina yang telah memasukkan kawasan kaya akan gas alam tersebut ke dalam *nine dash line* milik Cina.

Pada era presiden Joko Widodo hubungan kerjasama kedua negara diperkuat dengan peningkatan kerjasama ekonomi sektor pembangunan infrastruktur darat dan maritim serta sektor perdagangan yang diwujudkan melalui program kerjasama ekonomi *Belt and Road Initiative* pemerintah Cina. Meskipun hubungan kedua negara juga memiliki ketegangan pada bidang kedaulatan teritorinya, terutama penyikapan pemerintah Indonesia terhadap isu laut natuna.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua fenomena yang terbentuk yaitu konflik dan kerjasama. Untuk itu penulis akan mencoba menganalisa apa yang menjadi alasan bagi Indonesia tetap membentuk kerjasama perekonomian melalui proyek *Belt and Road Initiative* kepemimpinan Joko Widodo. Penelitian ini juga akan mencoba menganalisa strategi pemerintahan Indonesia terkait konflik laut natuna utara serta pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama ekonomi yang terjalin di kedua negara. Intinya Penelitian ini akan berusaha menguraikan fenomena kemitraan perekonomian sektor pembangunan infrastruktur antara Indonesia-Cina melalui mega proyek *Belt and Road Initiative* dengan adanya konflik di laut natuna.

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

“Bagaimanakah Konflik perbatasan maritim natuna utara mempengaruhi hubungan kerjasama ekonomi serta perpolitikan antara Indonesia dengan China melalui program belt and road initiative sektor infrastruktur pada pemerintahan Joko Widodo ?

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam upaya memperoleh informasi yang ada relevansinya terhadap pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan pemerintah Indonesia dalam menangani konflik di kawasan laut natuna utara yang tidak hanya berdampak pada bidang perekonomian tetapi juga dalam bidang perpolitikan.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai konflik dan penyelesaian persengketaan laut natuna utara kepemimpinan presiden Joko Widodo, memberikan uraian bagaimana hubungan kerjasama Indonesia dan Cina terkait pelanggaran-pelanggaran dan tumpang tindih kawasan perbatasan atas kedaulatan laut natuna utara serta implikasinya terhadap hubungan kerjasama ekonomi dan perpolitikan yang terjalin diantara kedua negara pada bidang infrastruktur melalui program *belt and road Initiative* meskipun dengan adanya konflik kedaulatan kawasan di laut natuna utara.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan selain dapat berguna bagi peneliti dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan, jelasnya sebagai berikut:



- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional khususnya peminat HI dalam bidang Ekonomi Politik Internasional khususnya mengenai keterkaitan dua fenomena yakni konflik dan kerjasama terhadap hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok dengan adanya konflik kawasan maritim natuna utara.
- Sebagai mahasiswa Hubungan Internasional diharapkan penelitian ini berguna dalam melatih cara berpikir secara sistematis untuk mengamati dan mendapat kejelasan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian.
- Dengan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dengan memperdalam pengetahuan mengenai hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam kerjasama ekonomi Belt and Road Initiative ditengah adanya konflik perairan natuna.
- Sebagai masukan dan bahan komparatif bagi penelitian sejenis serta menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- Bagi Pemerintah sebagai masukan sekaligus bahan tinjauan bagi pemerintah mengenai apakah kerjasama ekonomi yang dijalin dengan Tiongkok merupakan tindakan yang tepat untuk menjadi solusi peningkatan perekonomian di Indonesia.
- Bagi Universitas untuk menambah bahan bacaan hasil penelitian, khususnya mengenai konflik yang terjadi di laut natuna utara serta pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama perekonomian Indonesia dengan Tiongkok melalui program *Belt and Road Initiative*.

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, peneliti akan membagi sistematika penelitian ke dalam lima bab yang disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian ini. Berikut ini adalah sistematika penulisannya antara lain:

## **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Pertanyaan penelitian, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan. Bab ini secara garis besar berisi keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka akan mencakup penelitian terdahulu dan penjelasan atas teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian peranan Joko Widodo dalam mengatasi konflik perairan Natuna serta pengaruhnya terhadap hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia-Cina.

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data atau kredibilitas dan analisis data.

## **BAB IV : KETERKAITAN KONFLIK PERBATASAN KAWASAN DENGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARA INDONESIA DAN CINA**

Bab ini berisikan deskripsi mengenai dua fenomena yang bertolak belakang yakni konflik kedaulatan kawasan dan kerjasama perekonomian yang terjadi dalam hubungan internasional antara negara Indonesia dan Tiongkok. Cikal bakal terjadinya konflik perairan natuna serta upaya dan strategi yang diterapkan oleh presiden Joko Widodo dalam mempertahankan kedaulatan maritimnya. Serta keterkaitan konflik tersebut dengan kerjasama perekonomian yang terjalin diantara kedua negara.

## **BAB V : ANALISIS IMPLIKASI KONFLIK PERBATASAN MARITIM NATUNA UTARA TERHADAP**

## **HUBUNGAN KERJASAMA EKONOMI DAN POLITIK INDONESIA DAN CINA MELALUI BELT AND ROAD INITIATIVE**

Bab ini berisikan analisa mengenai pengaruh konflik perbatasan maritim laut natuna utara terhadap jalinan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Cina pada bidang ekonomi dan bidang politik melalui kerjasama pembangunan infrastruktur. Akankah konflik perbatasan maritim atas laut natuna utara mempengaruhi hubungan kerjasama ekonomi dan perpolitikan diantara kedua negara tersebut.

### **BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan semua pembahasan yang telah dibahas.

